

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2022

PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II



Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II

Jalan Jenderal Sudirman No.1/XXI Sanggau
Website www.pn-sanggau.go.id
Email info@pn-sanggau.go.id

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2022 kepada publik.

Di dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami susun ini memuat laporan hasil manajemen perkara, manajemen aset, keuangan dan sumber daya manusia yang kami lakukan selama tahun 2022 dalam rangka upaya memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat, selain laporan mengenai pengelolaan, kami sampaikan pula dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini capaian-capaian, pengembangan dan perubahan yang telah kami lakukan dalam rangka upaya mewujudkan suatu Badan Peradilan yang Agung sebagaimana visi Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 ini telah kami upayakan sebaik mungkin, walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi-insatansi yang memayungi kami ataupun dari masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kami kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sanggau atas kerjasama bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas pada Pengadilan Negeri Sanggau, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Sanggau.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk peningkatan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau pada masa-masa yang akan datang.

Sanggau, 5 Januari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

HAKLAINUL DUNGGIO, S.H., M.H.
NIP. 19790102 200312 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.....	1
B. VISI DAN MISI.....	2
C. RENCANA STRATEGIS.....	2
BAB II.....	4
KEADAAN PERKARA.....	4
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM.....	4
– Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	4
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	7
– Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	7
PERKARA PERDATA.....	8
– Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	8
PERKARA PERDATA.....	8
– Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	8
PERKARA PERDATA.....	9
– Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.....	9
– Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	9
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN).....	9
– Posbakum.....	9
– Sidang Keliling.....	11
– Perkara Prodeo.....	11
BAB III.....	12
SUMBER DAYA MANUSIA.....	12
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN	12

– Mutasi.....	20
– Promosi.....	20
– Pensiun	20
– Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	20
BAB IV	23
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI	
INFORMASI.....	23
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	23
a. Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	23
b. Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi	24
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	24
a. Gedung dan Bangunan	24
b. Kendaraan Dinas.....	24
c. Rumah Dinas.....	25
d. Sarana dan Prasarana	25
e. Pembelian/Pengadaan.....	26
f. Penerimaan Transfer Masuk dari Badan Urusan Mahkamah Agung RI.....	26
g. Penerimaan Hibah	26
Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau tidak mendapatkan Hibah.....	26
h. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).....	26
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	27
• Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum	27
• Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	28
• Implementasi e-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum.....	31
BAB V	33
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	33
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	33
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	34
BAB VI	35
PENGAWASAN	35
A. INTERNAL.....	35
B. EVALUASI.....	35
BAB VII	37
PENUTUP.....	37
A. KESIMPULAN.....	37
B. REKOMENDASI.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Sanggau memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Pengadilan Negeri Sanggau masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan daerah hukumnya meliputi wilayah 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari sebagai berikut:
 - Kabupaten Sanggau;
 - Kabupaten Sekadau;

Mengingat tanggungjawab Pengadilan Negeri Sanggau yang begitu besar, maka kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2022 ini telah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat diantaranya ialah mengaplikasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara menyeluruh dan telah terintegrasi dengan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI dengan berbagai macam kemudahan bagi pengguna pengadilan selain itu Pengadilan Negeri Sanggau juga telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah terintegrasi dengan *eraterang* Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Informasi dan Teknologi (IT) serta fasilitas penunjang guna Pengolahan data demi terwujudnya ketepatan dan keakuratan data yang tersaji dalam SIPP.

Guna Memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengguna pengadilan maka sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna pengadilan untuk lebih mempermudah proses pendaftaran perkara maupun pelayanan administrasi lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melayani wilayah hukum Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

B. VISI DAN MISI

Visi :

Visi Pengadilan Negeri Sanggau adalah

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGGAU YANG AGUNG.”

Misi :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pengguna pengadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau.

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Negeri Sanggau perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini. Kerangka (*framework*) pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta mengukur kondisi tersebut mengadopsi kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang “Pengadilan yang Ideal”. Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil *breakdown* dari konsep “Pengadilan yang Ideal” tersebut, yaitu (1) aspek proses peradilan/alur berperkara, (2) aspek sumber daya aparatur peradilan, (3) aspek pembinaan dan pengawasan, (4) aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, (5) aspek sarana dan prasarana, (6) aspek pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan, (7) aspek keterjangkauan pelayanan peradilan, dan (8) kepercayaan masyarakat.

Aspek butir (1) sampai butir (5) merupakan tinjauan penilaian tentang “Pengadilan yang Ideal” secara internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai butir (8) merupakan penilaian secara eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

ASPEK 1	PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan yang ideal• Pemisahan peran dan tanggung jawab, hakim dan non hakim• Sarana teknologi mendukung proses peradilan
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">• Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan
ASPEK 2	SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial• Sarana teknologi mendukung proses pengelolaan SDM

Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja • Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam setiap fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan • Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang akan dicapai
ASPEK 3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan • Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien • Evaluasi penilaian kinerja • Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi
ASPEK 4	TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan kegiatan yang tepat • Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan • Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang berorientasi kepada hasil (<i>Outcome</i>) • Penetapan strategi sesuai dengan tujuan • Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada
ASPEK 5	SARANA DAN PRASARANA
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana gedung dan fasilitas perkantoran • Penyediaan sarana teknologi mendukung proses peradilan
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan
ASPEK 6	PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PARA PENCARI KEADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna
ASPEK 7	KETERJANGKAUAN PELAYANAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya perkara yg terjangkau masyarakat • Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan
ASPEK 8	KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan informasi proses perkara pengadilan • Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, one day publish
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan informasi statistik pengawasan

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detil mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

– Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERKARA PIDANA

• Perkara Pidana Biasa

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	66	18	84	28	0	28	27	1	57	188	142
2	Februari	57	27	84	35	0	36	33	3	51	174	139
3	Maret	51	28	79	25	2	28	20	8	59	165	134
4	April	59	62	121	24	13	32	32	0	89	260	206
5	Mei	89	17	106	32	12	32	26	6	80	236	184
6	Juni	80	38	118	39	10	45	37	8	81	248	193
7	Juli	81	24	105	46	7	54	43	11	62	216	172
8	Agustus	62	24	86	31	10	42	39	3	47	182	143
9	September	47	13	60	26	11	29	24	5	36	132	104
10	Oktober	36	40	76	22	9	27	24	3	52	178	131
11	November	52	57	109	22	8	25	23	2	86	191	116
12	Desember	86	47	133	53	0	55	48	7	85	198	87
Total			395		383			376			2368	1751

• Perkara Pidana Singkat

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0		0			0			0	0

• Perkara Pidana Cepat

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	5	5	5	0	5	5	0	0	10	6
2	Februari	0	5	5	5	0	5	5	0	0	7	4
3	Maret	0	3	3	3	0	3	3	0	0	5	3
4	April	0	2	2	2	0	2	2	0	0	3	2
5	Mei	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
11	November	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1
12	Desember	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
Total			19		19			19			30	19

- **Perkara Lalu Lintas**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	156	156	156	0	156	156	0	0	468	156
2	Februari	0	253	253	253	0	253	253	0	0	759	253
3	Maret	0	138	138	138	0	138	138	0	0	414	138
4	April	0	224	224	224	0	224	224	0	0	672	224
5	Mei	0	31	31	31	0	31	31	0	0	93	31
6	Juni	0	50	50	50	0	50	50	0	0	150	50
7	Juli	0	211	211	211	0	211	211	0	0	633	211
8	Agustus	0	173	173	173	0	173	173	0	0	519	173
9	September	0	15	15	15	0	15	15	0	0	45	15
10	Oktober	0	8	8	8	0	8	8	0	0	24	8
11	November	0	11	11	11	0	11	11	0	0	33	11
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			1270		1270			1270			3810	1270

- **Perkara Pidana Khusus Anak**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1
4	April	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1
5	Mei	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
6	Juni	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
7	Juli	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
10	Oktober	0	8	8	2	0	2	2	0	6	8	5
11	November	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	3
12	Desember	3	0	3	1	0	1	1	0	2	3	0
Total			12		10			10			25	14

- **Perkara Pidana Praperadilan**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
8	Agustus	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			2		2			2			4	0

PERKARA PERDATA

- **Perkara Perdata Gugatan**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	8	1	0	4	13	4	0	0	0	0	0	5	0	3	2	10
2	Februari	8	2	0	6	16	3	0	0	0	0	0	5	0	4	1	12
3	Maret	11	1	0	3	15	3	2	0	2	0	0	4	0	2	2	13
4	April	11	2	0	6	19	9	5	0	0	0	0	11	0	11	0	8
5	Mei	8	0	0	5	13	3	5	0	1	0	0	3	0	3	0	10
6	Juni	10	0	0	4	14	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7	Juli	14	0	0	5	19	4	3	0	5	0	0	4	0	3	1	16
8	Agustus	15	1	0	4	20	3	1	0	2	0	0	4	0	3	1	17
9	September	16	1	0	2	19	5	1	0	1	0	0	6	0	6	0	13
10	Oktober	13	0	0	6	19	5	0	0	0	0	0	5	0	4	1	15
11	November	14	1	0	3	18	7	0	0	2	0	0	8	0	7	1	11
12	Desember	10	1	0	5	16	4	0	0	1	0	0	5	0	4	1	12
TOTAL					53		50		0	14	0	0			50		

• Perkara Perdata Permohonan

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	2	0	0	4	6	3	0	0	0	0	0	3	0	2	1	4
2	Februari	3	1	0	1	5	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2
3	Maret	2	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	3	0	2	1	2
4	April	1	1	0	2	4	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
5	Mei	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
6	Juni	2	0	0	9	11	7	0	0	0	0	0	7	0	5	2	6
7	Juli	4	2	0	6	12	6	1	0	0	0	0	8	0	8	0	4
8	Agustus	4	0	0	10	14	11	0	0	0	0	0	11	0	10	1	4
9	September	3	1	0	4	8	5	0	0	0	0	0	6	0	6	0	2
10	Oktober	2	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3
11	November	3	0	0	4	7	6	0	0	0	0	0	6	0	4	2	3
12	Desember	1	2	0	1	4	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1
TOTAL					50		51		0	0	0	0			51		

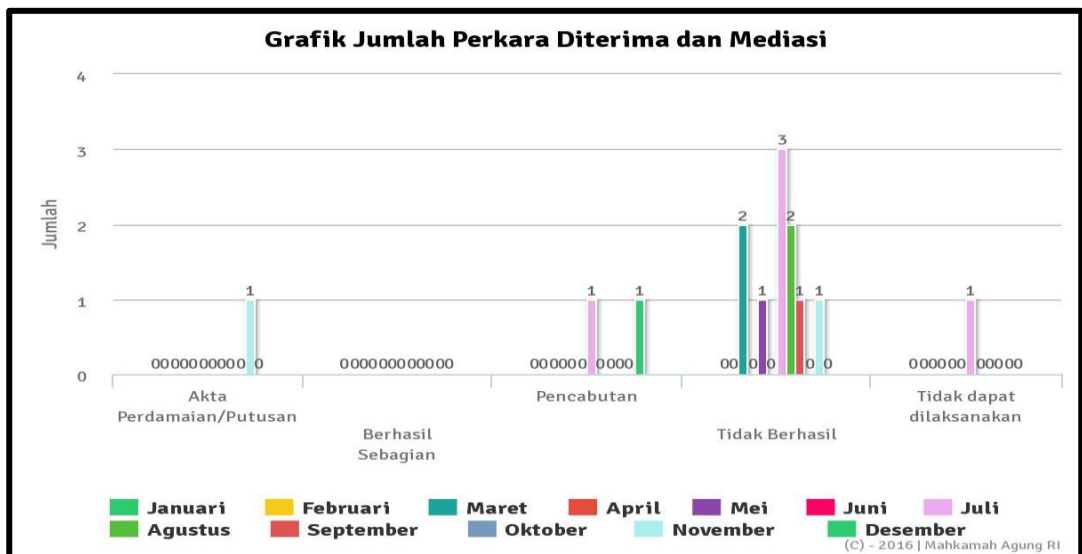
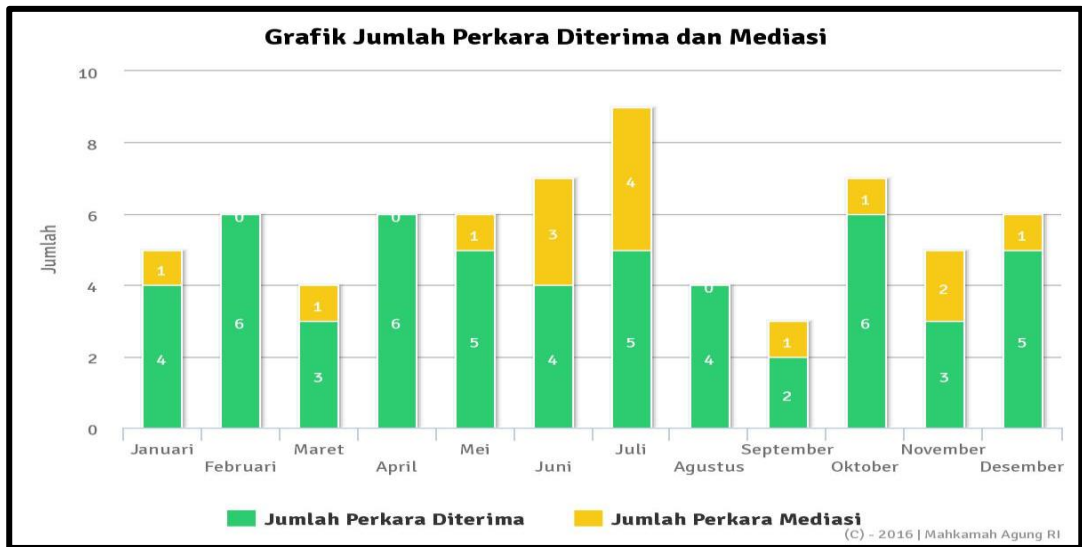
• Perkara Perdata Gugatan Sederhana

No	Periode	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus	Status Penyelesaian Perkara			Jenis Kelamin		
				Akta Perdamaian	Penetapan Dismissal	Penetapan Gugur	Putusan	Laki - Laki	Perempuan
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	-	-	-	-	-	-	2
4	April	-	1	-	-	-	1	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	1	-	-	-	-	-	1	1
10	Oktober	1	1	-	-	-	1	1	1
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	1	-	-	-	1	-	-
TOTAL		3	3	-	-	-	3	2	4

• Perkara Perdata Konsinyasi

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	3	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	3	0	3	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	7	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
4	April	7	0	0	0	7	7	2	0	0	0	0	7	0	7	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	8	8	8	2	0	0	0	0	8	0	8	0	0
TOTAL					15		18		0	0	0	0			18		

- **Data Mediasi Pengadilan Negeri Sanggau**



B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus**

- **PIDANA**

PERKARA PIDANA	JUMLAH					
	BIASA	PID.SUS. ANAK	SINGKAT	RINGAN/ CEPAT	LANTAS	PRA PERADILAN
SISA TAHUN 2021	66	-	-	-	-	-
MASUK TAHUN 2022	395	12	-	19	1270	2
SISA TAHUN 2022	86	-1	-	0	0	0

- **PERDATA**

PERKARA PERDATA	JUMLAH					EKSEKUSI RISALAH LELANG
	GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN KONSINYASI	EKSEKUSI PUTUSAN	
SISA TAHUN 2021	8	2	-	3	-	-
MASUK TAHUN 2022	53	50	3	15	-	-
SISA TAHUN 2022	13	1	0	-	-	-

– **Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

- **PIDANA**

PERKARA PIDANA	JUMLAH					
	BIASA	PID.SUS. ANAK	SINGKAT	RINGAN/ CEPAT	LANTAS	PRA PERADILAN
SISA TAHUN 2021	66	-	-	-	-	-
MASUK TAHUN 2022	395	10	-	19	1270	2
PUTUS TEPAT WAKTU	383	10	-	19	1270	2

- **PERDATA**

PERKARA PERDATA	JUMLAH					EKSEKUSI RISALAH LELANG
	GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN KONSINYASI	EKSEKUSI PUTUSAN	
SISA TAHUN 2021	8	2	-	3	-	-
MASUK TAHUN 2022	53	50	3	15	-	-
PUTUS TEPAT WAKTU	48	1	0	-	-	-

– **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK**

- **PIDANA**

PERKARA PIDANA	JUMLAH					
	BIASA	PID.SUS. ANAK	SINGKAT	RINGAN/ CEPAT	LANTAS	PRA PERADILAN
Putus Tahun 2022	383	10	-	19	1270	2
Upaya Hukum	56	-	-	-	-	-
PERKARA YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM (BD,KS,PK)	383	10	-	19	1270	2

- **PERDATA**

PERKARA PERDATA	JUMLAH					EKSEKUSI RISALAH LELANG
	GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN KONSINYASI	EKSEKUSI PUTUSAN	
Putus Tahun 2022	48	51	2	3	-	-
Upaya Hukum	5	-	-	-	-	-
PERKARA YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM (BD,KS,PK)	48	51	2	15	-	-

- **Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi**

PERKARA PERDATA	JUMLAH	PERSENTASE
JUMLAH PERKARA	53	-
JUMLAH PERKARA MEDIASI	36	67%
BERHASIL (AKTA DAMAI)	1	1%
BERHASIL SEBAGIAN	-	-
BERHASIL (CABUT)	2	3%
TIDAK BERHASIL	11	20%
MEDIASI BERJALAN	3	5%

- **Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi**

PERKARA PIDANA	JUMLAH DIVERSI
JUMLAH PERKARA	12
JUMLAH PERKARA DIVERSI	4
BERHASIL	3
TIDAK BERHASIL	1

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

- **Posbakum**

Pengadilan Negeri Sanggau bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Sanggau memberikan layanan Pos Bantuan

Hukum (POSBAKUM) kepada masyarakat pengguna pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau.



Ruang Pelayanan POSBAKUM

Waktu pelayanan Hari kerja mulai Senin s/d Kamis pukul : 09.00 s/d 13.00 Wib, pelayanan yang diberikan antara lain :

- Konsultasi Hukum
- Penulisan Dokumen Hukum
- Bantuan untuk memperoleh layanan advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan, tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum)
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

REKAPITULASI PELAYANAN POSBAKUM SANGGAU

NO	Periode	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Januari - Maret 2022	32 Orang	Konsultasi
2	April - Juni 2022	47 Orang	Konsultasi
3	Juli - September 2022	45 Orang	Konsultasi
4	Oktober - Desember 2022	44 Orang	Konsultasi, Pembuatan Dokumen

Total	168 Orang	
--------------	-----------	--

– **Sidang Keliling**

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, untuk memberikan pelayanan pada masyarakat pada Kabupaten Sekadau maka Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan sidang keliling pada Gedung Zitting Plaatz Pengadilan Negeri Sanggau yang berlokasi di Kabupaten Sekadau.

– **Perkara Prodeo**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Sanggau tidak mendapatkan anggaran untuk perkara prodeo, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya Pengadilan Negeri Sanggau tidak dapat memanfaatkan anggaran prodeo tersebut dikarenakan Panjar Biaya Perkara lebih besar dari pada anggaran dana yang disediakan sehingga perkara prodeo tidak dapat terlaksana.

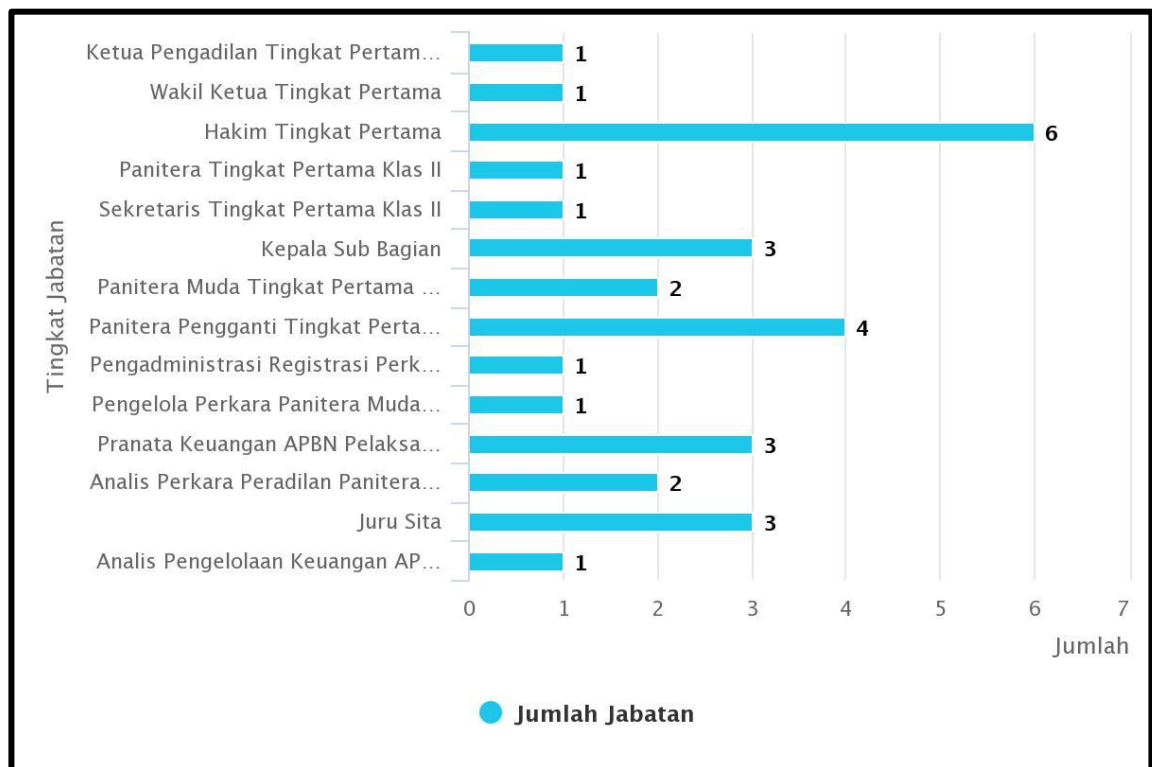
BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

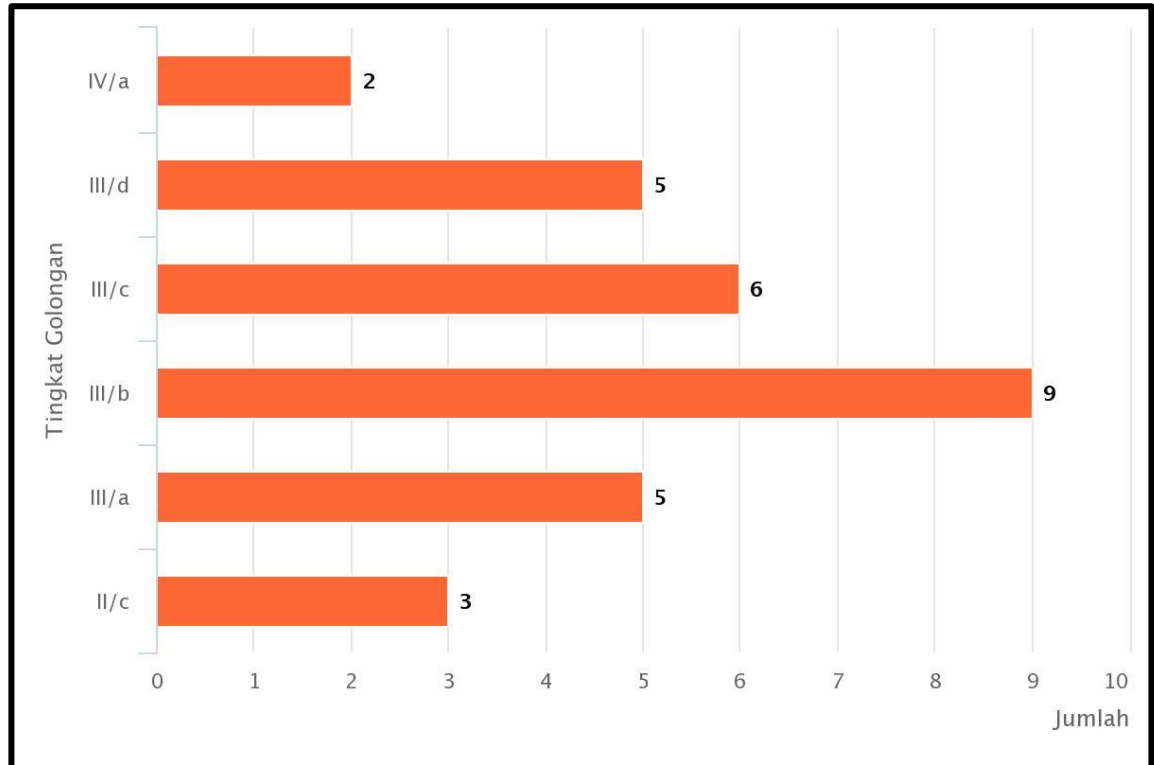
Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

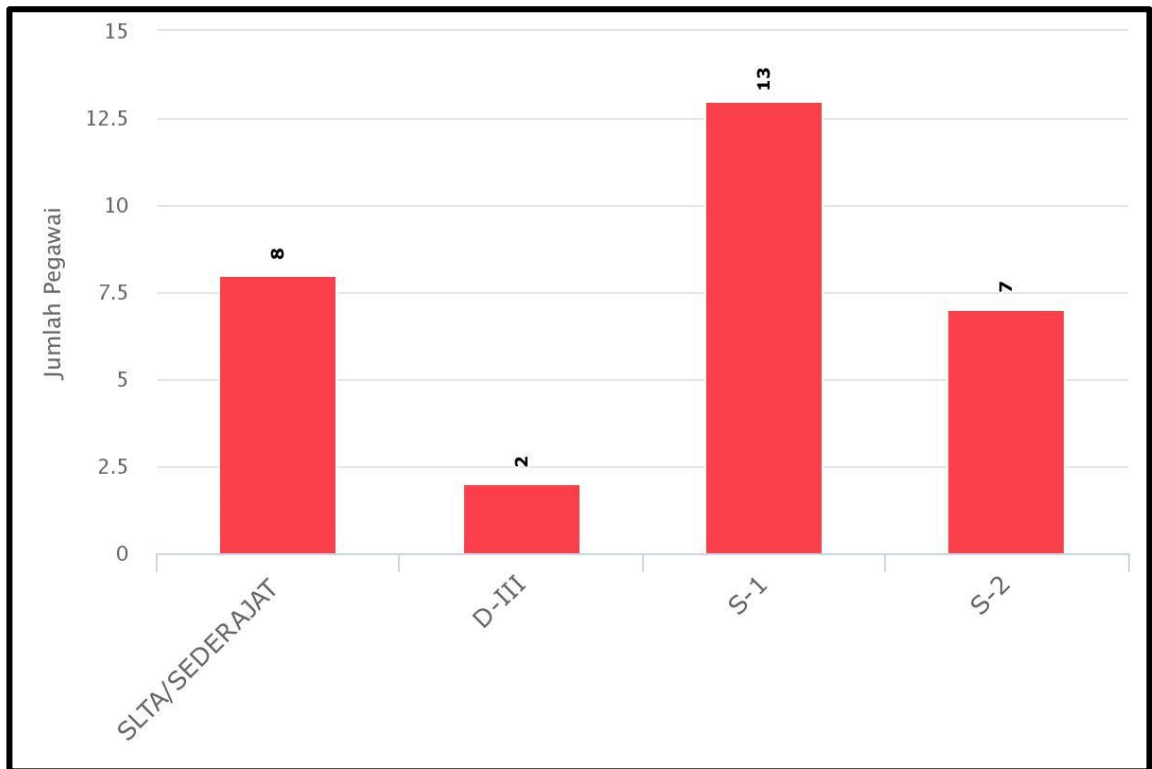
- **Tingkat Jabatan Pegawai**



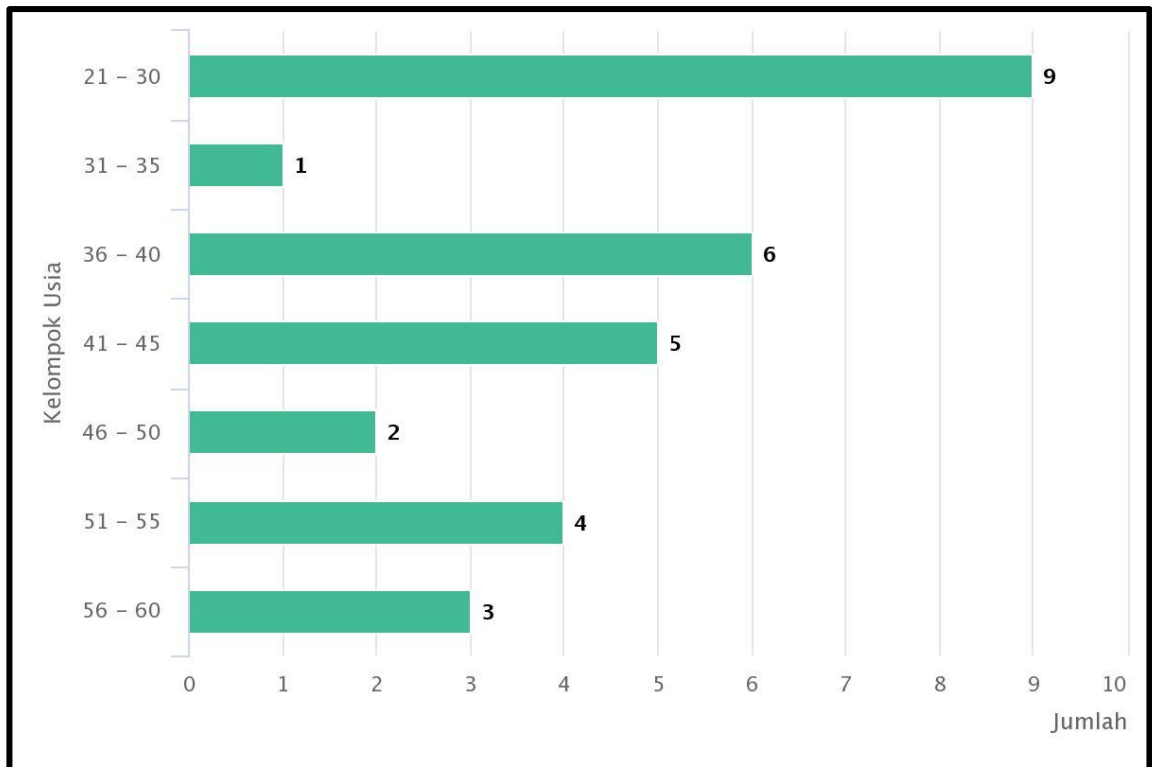
- **Tingkat Golongan Pegawai**



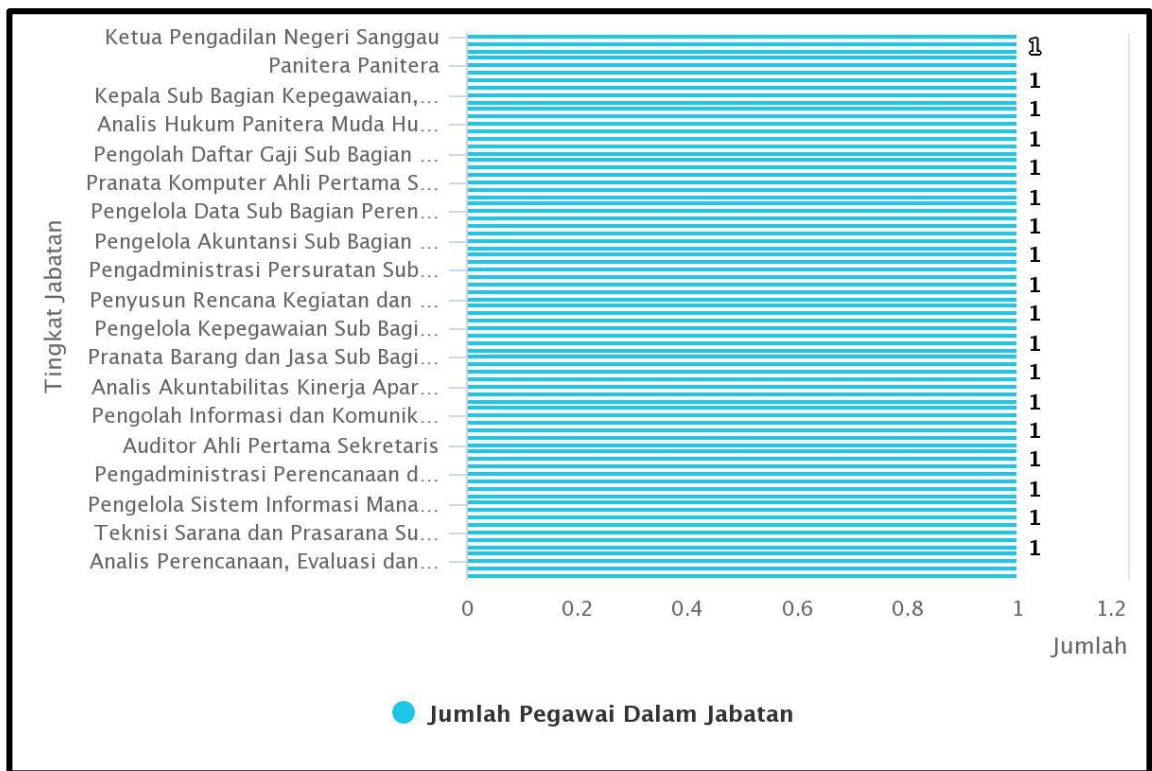
- **Tingkat Pendidikan Pegawai**



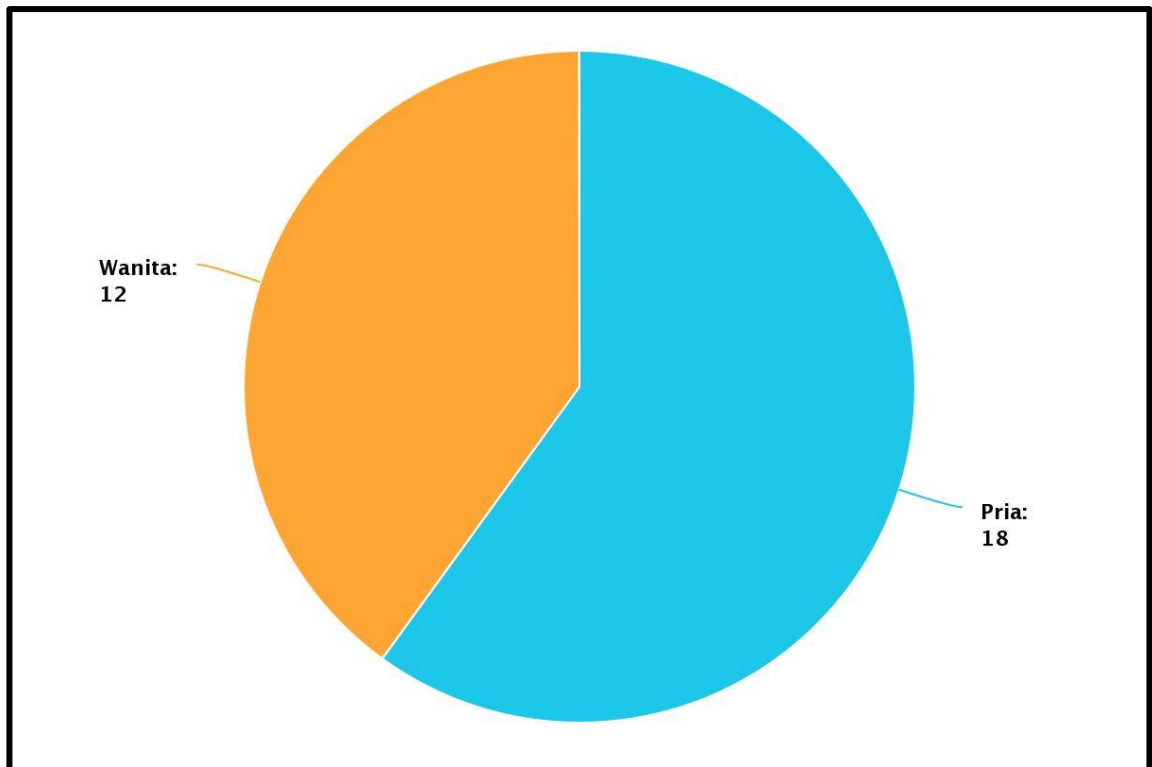
- **Statistik Usia Pegawai**



- **Statistik Jabatan**



▪ **Statistik Jenis Kelamin Pegawai**



Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Haklainul Dunggio, SH.,M.H.	197901022003121001	Ketua Pengadilan	2022-06-20	18 tahun 9 bulan	IV/a	2020-04-01	PASCASARJANA	Universitas Brawijaya	2019
2	Ratna Damayanti Wisudha, S.H.	197710042005022003	Wakil Ketua Pengadilan	2022-03-1-01	17 thun 7 bulan	IV/a	2021-04-01	STRATA I	Universitas Jenderal Sudirman	2001
3	Milawati, S.E.	197911242006042001	Kepala Sub Bagian	2015-12-23	16 tahun 5 bulan	III/d	2018-04-01	STRATA I	Unuversitas Tanjungpura Ptk	2002
4	Diah Purwadani, S.H.	198405152007042001	Panitera Tingkat Pertama	2021-08-03	15 tahun 5 bulan	III/d	2019-04-01	PASCASARJANA	Universitas Tanjungpura Ptk	2018
5	Zulkarnain, S.Kom.,M.Ak.	198507302009041003	Sekretaris	2020-08-18	13 tahun 5 bulan	III/d	2021-04-01	PASCASARJANA	Universitas Tanjungpura Ptk	2019
6	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	198402012011011010	Hakim Tingkat Pertama	2019-05-27	11 tahun 8 bulan	III/d	2021-10-01	PASCASARJANA	Universitas Tanjungpura Ptk	2010
7	Warsidik, S.H.	197210271994031003	Panitera Pengganti	2008-02-20	28 tahun 6 bulan	III/d	2022-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2019
8	Mahyudi Us	196404121985031001	Panitera Muda Hukum	2016-12-22	37 tahun 6 bulan	III/c	2009-10-01	SLTA	Bhakti	1984
9	Gatot Sukmanto	196706161990031002	Kepala Sub Bagian	2015-12-23	32 tahun 6 bulan	III/c	2016-04-01	SLTA	SMAN 3 Pontianak	1987

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Ratmin	197106201989031001	Panitera Pengganti	2003-07-01	33 tahun 6 bulan	III/c	2018-04-01	SLTA	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	1993
11	Nurhazizah	197002071994032004	Kepala Sub Bagian	2015-12-23	28 tahun 6 bulan	III/c	2018-04-01	SLTA	SMEA NEGERI SANGGAU	1989
12	Guswandi, S.H.	198508252014031001	Panitera Pengganti	2019-08-20	8 tahun 6 bulan	III/c	2018-04-01	STRATA I	Universitas Andalas	2008
13	Nesy Indah Januarisma, S.H.	198901122014032003	Panitera Pengganti	2019-08-20	8 tahun 6 bulan	III/c	2018-04-01	PASCASARJANA	Universitas Tanjungpura Ptk	2018
14	Marlinda Paulina Sihite,	196903231990032002	Panitera Muda	2016-12-22	32 tahun 6 bulan	III/b	2013-04-01	SLTA	NEGERI SINGKAWANG	1988
15	Simon Supardi	196502181991031005	Juru Sita	2015-06-05	31 Tahun 6 bulan	III/b	2020-04-01	SLTA	SMAN 2	1988
16	Mustar	196510011993031014	Juru Sita	2015-06-05	29 tahun 6 bulan	III/b	2020-04-01	SLTA	SMEAN 1 Pontianak	1986
17	Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M.	19931018201761220	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-21	4 tahun 9 bulan	III/b	2021-10-01	PASCASARJANA	The University Melbourne Law School	2017
18	Muhammad Nur Hafizh, S.H.	199403232017121003	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-21	4 tahun 9 bulan	III/b	2022-04-01	STRATA I	Universitas Indonesia	2016
19	Wakibosri Sihombing, S.H.	199203072017121006	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-21	4 tahun 9 bulan	III/b	2022-04-01	STRATA I	Universitas Sumatra Utara	2016

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.	199403232017121003	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-30	4 tahun 9 bulan	III/b	2022-04-01	STRATA I	Universitas Sumatra Utara	2016
21	Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.	199311182017122003	Hakim Tingkat Pertama	2022-01-21	4 tahun 9 bulan	III/b	2022-0-01	PASCASARJANA	Universitas Janabadra	2021
22	Budi Hartono, A. Md., S.H.	198401012011011015	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	2021-04-01	11 tahun 8 bulan	III/a	2019-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2019
23	Rossanti, S.H.	198109282009122002	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	2021-04-01	12 tahun 9 bulan	III/a	2019-10-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2018
24	Khairil Anwar, S.H.	198301102009121005	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2021-04-01	12 tahun 9 bulan	III/a	2019-10-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2018
25	Fahmi, S.H.	197604012012121003	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	2021-04-01	9 tahun 9 bulan	III/a	2020-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2019
26	Zid Hartsa Firdausi, S.H.	199607242020122005	Analisis Perkara Peradilan	2022-07-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2020-12-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	2017
27	Jerman Kiki, S.H.	199705202022031002	Analisis Perkara Peradilan	2023-03-01	0 tahun 6 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Tanjungpura	2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Siti Aulia Agustina, A.MD.T.	199708052020122007	Pengadministrasi Registrasi Perkara	2020-12-01	1 tahun 0 bulan	II/c	2020-12-01	Diploma III	Politeknik Negeri Surabaya	2018
29	Alexander Sinaga	198101022012121003	Juru Sita Pengganti	2018-10-30	9 tahun 9 bulan	II/c	2020-04-01	SLTA	SMUN 2 SANGGAU	2001
30	Yunita Magdalena Siregar, A.Md	199506132022032008	Pengelola Perkara	2022-03-01	0 tahun 6 bulan	II/c	2022-03-01	Diploma III	Politeknik Negeri Medan	2016

– **Mutasi**

Pada tahun 2022 terdapat mutasi pegawai yang masuk dan keluar, antara lain :

• **Mutasi Masuk**

No	Nama	Masuk	Tujuan
1.	Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.	Januari 2022	Hakim PN Sanggau
2.	Ratna Damayanti Wisudha, S.H.	Maret 2022	WKPN Sanggau
3.	Jerman Kiki, S.H.	April 2022	CPNS PN Sanggau
4.	Yunita Magdalena Siregar, A.Md.	Mei 2022	CPNS PN Sanggau
5.	Haklainul Dunggio, S.H., M.H.	Juni 2022	Ketua PN Sanggau

• **Mutasi Keluar**

No	Nama	Keluar	Tujuan
1.	Dian Anggraini, S.H., M.H.	Juni 2022	Hakim BAWAS MARI
2.	Yuristi Laprimoni, S.H.	Juni 2022	Hakim PN Ngawi
3.	Suparman, S. IP.	November 2022	Panitera PN Putussibau

– **Promosi**

Pada tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sanggau terdapat promosi pegawai :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	ALEXANDER SINAGA	Jurusita Pengganti	Jurusita

– **Pensiun**

Pada Tahun 2022 tidak terdapat pegawai Pengadilan Negeri Sanggau yang pensiun, antara lain :

No	Nama	Jabatan	Pensiun
1.	NIHIL	-	-

– **Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

Selama tahun 2022 beberapa Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sanggau mengikuti diklat, antara lain :

No	Nama	Penyelenggara	Nama Diklat	Waktu
1.	Muhammad Nur Hafizh, SH.	Balitbang diklat Kumdil	Pelatihan Singkat Dalam Rangka Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang 2022	Tahap I : 02 s.d 03 Agustus 2022 Tahap II: 04 Agustus 2022
2.	Wakibosri Sihombing, SH.	Balitbang diklat Kumdil	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tahap I : 15 s.d 19 Agustus 2022 Tahap II: 22 s.d 26 Agustus 2022
3.	Muhammad Nur Hafizh, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tahap I : 15 s.d 19 Agustus 2022 Tahap II: 22 s.d 26 Agustus 2022
4.	Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tahap I : 15 s.d 19 Agustus 2022 Tahap II: 22 s.d 26 Agustus 2022
5.	Jerman Kiki, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Latsar CPNS Secara Blended Learning	05 September s.d 18 November 2022
6.	Yunita Magdalena Siregar, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Latsar CPNS Secara Blended Learning	05 September s.d 18 November 2022
7.	Diah Purwadani, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Online Penyusunan SPIP Integratif Angkatan 1 (satu)	26 s/d 30 September 2022
8.	Milawati, SE.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Online Penyusunan Laporan Kinerja Angkatan 4 (empat)	31 Oktober 2022 s/d 04 November 2022
9.	Diah Purwadani, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas MA 2045	16 November 2022 s.d 25 November 2022
10.	Jerman Kiki, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Latsar CPNS Tahap Pembelajaran Klasikal Kerjasama dengan PPSDMAP Kemenhub Tahun 2022	13 November s.d 20 November 2022

11.	Yunita Magdalena Siregar, SH.	Balitbang Diklat Kumdil	Latsar CPNS Tahap Pembelajaran Klasikal Kerjasama dengan PPSDMAP Kemenhub Tahun 2022	13 November s.d 20 November 2022
12.	Eliyas Eko Setyo, SH., MH.	Balitbang Diklat Kumdil	Lokakarya Tentang Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kerjasama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI)	29 November 2022 s.d 2 Desember 2022

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan perubahan mendasar di bidang keuangan Negara termasuk reformasi di bidang penyusunan anggaran pemerintah (Kementerian/Lembaga) sebagai pelaksana UU No.17 tahun 2003 tersebut. Pemerintah kemudian menerbitkan dua peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut tentang proses perencanaan dan proses penganggaran. Kedua PP tersebut adalah PP No.20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Sistem penyusunan anggaran ini tidak dapat dilaksanakan dengan seketika. Untuk itu pemerintah memberikan masa transisi 5 tahun lagi bagi Kementerian/Lembaga untuk dapat menerapkan system ini secara bertahap. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara juga berpedoman pada ketentuan UU No.17 tahun 2003 dalam hal pembuatan anggaran dan laporan keuangannya. Sementara itu dengan adanya system satu atap maka Mahkamah Agung bertanggung jawab atas keseluruhan anggaran pengadilan sebagai satuan kerja yang berada dibawahnya. Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau merupakan salah satu bagian dari anggaran Mahkamah Agung.

a. Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp.296.921.000 (*dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

**Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)**

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA BARANG	296.921.000	99,62%	295.805.600	99.62%
TOTAL	296.921.000	99.62%	295.805.600	99,62%

Catatan :

Dari total Belanja Barang pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat alokasi anggaran **Layanan Pos Bantuan Hukum** Sebesar Rp. 57.600.000 (*lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar 100%.

b. Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi

DIPA Badan Urusan Administrasi untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp. 4.903.575.000 (*empat miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

**Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01
(Badan Urusan Administrasi)**

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA PEGAWAI	3.590.747.000	99.62%	3.572.062.317	99.62%
BELANJA BARANG	1.248.828.000	98.23%	1.231.673.988	98.23%
BELANJA MODAL	64.000.000	94.52%	60.493.900	94.52%
TOTAL	4.903.575.000	99.20%	4.864.230.205	99,20%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Gedung dan Bangunan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	1			Bangunan kantor belum sesuai dengan <i>Prototype</i> Mahkamah Agung
2	RUMAH DINAS KETUA	1			1	Rusak Berat
3	RUMAH DINAS WAKIL	1	1			
4	RUMAH DINAS	7	7			
5	ZITTING PLAATZ	3	1		2	Rusak berat 2 unit rusak ringan 1 unit

b. Kendaraan Dinas

NO.	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	JENIS KENDARAAN RODA 4					
1	KIJANG INNOVA	2008	√			
2	KIJANG MINIBUS KF 50	1993		√		
3	KF70	2003		√		

4	TOYOTA HILUX	2012	√			HIBAH PEMDA SANGGAU
5	TOYOTA INNOVA Adventurer	2020	√			HIBAH PEMDA SANGGAU
II	JENIS KENDARAAN RODA 2					
1	HONDA NF 125 SD	2005	√			
2	HONDA NF 125 SD	2005	√			
3	YAMAHA RXS	1993	√			
4	HONDA NF 125 S	2005	√			
5	YAMAHA JUPITER	2003	√			

c. Rumah Dinas

NO.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	RUMAH DINAS					
1	RUMAH DINAS KETUA	1		√		
2	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	1	√			
3	RUMAH DINAS HAKIM	5	√			
4	RUMAH DINAS PANITERA	1	√			
5	RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	√			

d. Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN
I	RUANG KANTOR		
1	RUANG KETUA	1	
2	RUANG WAKIL KETUA	1	
3	RUANG HAKIM	1	
4	RUANG PANITERA	1	
5	RUANG SEKRETARIS	1	
6	R. SIDANG UMUM	2	
7	R. SIDANG ANAK	1	
8	R.KEPANITERAAN	4	
9	R.KESEKRETARIATAN	3	
10	R.TELECONFRENCE / KAUKUS	1	
11	R. MEDIASI / DIVERSI	1	
NO.	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN

12	R.TUNGGU ANAK	1	
13	R.RAMAH ANAK / LAKTASI	1	
14	R.PERPUSTAKAAN	1	
15	R.RARSIP	1	
16	R.GUDANG	2	
17	R. TAHANAN	2	
18	R. SERVER	1	

e. Pembelian/Pengadaan

- Pengolah Data & Komunikasi

NO.	JENIS BARANG	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP.)	TOTAL HARGA
1	Printer	Unit	2	5.680.000	11.360.000
2	PC Kewanitaraan	Unit	4	12.990.000	52.640.000
Jumlah					64.000.000

f. Penerimaan Transfer Masuk dari Badan Urusan Mahkamah Agung RI

NO.	JENIS BARANG	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP.)	TOTAL HARGA
1	Laptop	Unit	9	14.990.000	139.910.000
Jumlah					139.910.000

g. Penerimaan Hibah

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau tidak mendapatkan Hibah.

NO.	JENIS BARANG	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP.)	TOTAL HARGA (Rp.)
	NIHIL				
Jumlah					

h. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Pada tahun 2022 tidak terdapat penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Sanggau.

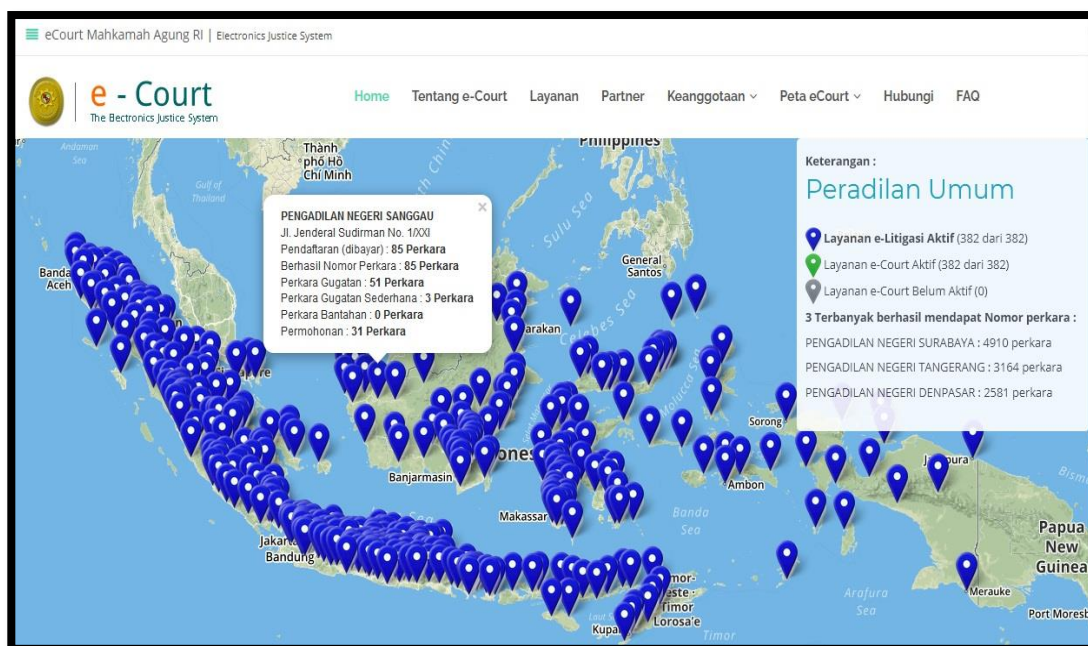
NO	Jenis Barang	Kode Barang	NUP	Lokasi	Tahun Perolehan	Ket
	NIHIL					

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

• Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka mulai tanggal 1 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan penerimaan perkara perdata baik gugatan atau pun permohonan secara elektronik.

Sehingga pada tahun 2022 seluruh perkara Perdata telah diterima melalui Aplikasi E-Court.



Sumber : https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum

Rekapitulasi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sanggau Secara elektronik (*e-court*) :

No	Jenis Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Ecourt	Elitigasi
1	Gugatan	53	53	0
2	Permohonan	50	50	0
3	Gugatan Sederhana	3	3	0
4	Permohonan Konsinyasi	15	0	0

Dalam pelaksanaan penerapan Administrasi Perkara secara Elektronik baik e-court maupun e-litigasi, Pengadilan Negeri Sanggau telah memberikan fasilitas berupa e-court corner yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna pengadilan, pada e-court corner telah kami siapkan seperangkat alat komputer lengkap dengan printer dan scanner serta telah terkoneksi dengan jaringan internet.



Meja e-Court pada e-Court Corner Pengadilan Negeri Sanggau

- **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Aplikasi Utama pada Pengadilan Negeri Sanggau, Aplikasi ini sangat penting mengingat seluruh proses perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau telah di *input* pada aplikasi tersebut sehingga menjaga agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan terus menerus adalah menjadi suatu keharusan mutlak.

Selain Server yang dikirimkan langsung dari Mahkamah Agung RI, pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sanggau juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau untuk pengadaan server sehingga sampai akhir Desember 2019 Pengadilan Negeri Sanggau memiliki 3 (tiga) buah server untuk menangani Aplikasi SIPP, PTSP dan Backup data SIPP Pengadilan Negeri Sanggau.

Setiap proses perkara secara rutin telah diinput melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau selama perkara tersebut telah diakomodir oleh Aplikasi SIPP.

Untuk Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau pada periode Januari – Desember 2022 mendapatkan Total **969.05 Point**

**Detail Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau
Januari - Desember 2022**

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
1	Kinerja	Jumlah Rasio Penanganan Perkara <i>Rekapitulasi Rasio Penanganan Perkara (Nilai Maksimal 100.00)</i>	81,4
2	Kinerja	Rilis Versi SIPP <i>Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja (Nilai Maksimal 25.00)</i>	25
3	Kinerja	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara <i>Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 (Nilai Maksimal 25.00)</i>	25
4	Kinerja	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk <i>Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk, Maksimal 7 Hari Kerja (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
5	Kepatuhan	Pendaftaran Perkara <i>Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 30.00)</i>	30
6	Kepatuhan	Pencatatan Barang Bukti <i>Kepatuhan Pengguna dalam mengisi Barang Bukti suatu perkara (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
7	Kepatuhan	Penetapan Hakim <i>Kepatuhan penetapan Majelis/Hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 28.00)</i>	28
8	Kepatuhan	Penetapan Panitera Pengganti <i>Kepatuhan penetapan Panitera Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 28.00)</i>	28
9	Kepatuhan	Penetapan Jurusita/Juru Pengganti <i>Kepatuhan penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 28.00)</i>	27,74
10	Kepatuhan	Penetapan Hari Sidang Pertama <i>Kepatuhan penetapan Hari Sidang dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja (Nilai Maksimal 28.00)</i>	27,95
11	Kepatuhan	Penginputan Tuntutan <i>Kepatuhan waktu dalam input Tuntutan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 30.00)</i>	29,22
12	Kepatuhan	Penginputan Putusan Akhir <i>Kepatuhan waktu dalam input Putusan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 30.00)</i>	29,54
13	Kepatuhan	Penginputan Minutasi <i>Kepatuhan waktu dalam input Minutasi dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 30.00)</i>	29,88
14	Kepatuhan	Minutasi Perkara <i>Ketepatan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 (tujuh) hari (Nilai Maksimal 30.00)</i>	29,58
15	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Banding <i>Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Banding dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 10.00)</i>	9,88
16	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Kasasi <i>Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Kasasi dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 8.00)</i>	7,85
17	Kepatuhan	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali <i>Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
18	Kepatuhan	Pengiriman Berkas Banding <i>Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu maksimal 30 hari (PERDATA) atau 14 hari (PIDANA) (Nilai Maksimal 10.00)</i>	10

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
19	Kepatuhan	Pengiriman Berkas Kasasi <i>Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 65 hari (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
20	Kepatuhan	Pengiriman Berkas PK <i>Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA) (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
21	Kepatuhan	Pemberitahuan Putusan/Penetapan <i>Kepatuhan waktu dalam input tanggal pemberitahuan putusan dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 30.00)</i>	29,88
22	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim <i>Kepatuhan waktu dalam input penetapan Majelis Hakim/Hakim dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 28.00)</i>	27,53
23	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti <i>Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Panitera Pengganti dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 28.00)</i>	28
24	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Hari Sidang <i>Kepatuhan waktu dalam input penetapan hari sidang dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 28.00)</i>	27,74
25	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Jurusita <i>Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 28.00)</i>	28
26	Kepatuhan	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi <i>Kepatuhan waktu dalam input Data Pelaksanaan Delegasi dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 10.00)</i>	9,77
27	Kepatuhan	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang <i>Kepatuhan input penundaan jadwal sidang dalam waktu 1x24 jam (Nilai Maksimal 28.00)</i>	26,88
28	Kepatuhan	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan <i>Kepatuhan penginputan perpanjangan penahanan maksimal 1x24 jam sejak tanggal penetapan (Nilai Maksimal 25.00)</i>	23,60
29	Kepatuhan	Unggah Putusan Akhir <i>Kepatuhan unggah dokumen Putusan Akhir maksimal 1x24 jam sejak tanggal putus (Nilai Maksimal 25.00)</i>	20,47
30	Kelengkapan	E-Document Dakwaan/Petitum <i>Kelengkapan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (Data Umum) (Nilai Maksimal 20.00)</i>	20
31	Kelengkapan	Pencatatan Saksi <i>Kelengkapan pencatatan Data Saksi (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
32	Kelengkapan	E-Document Tuntutan <i>Kelengkapan Dokumen Elektronik Tuntutan (Nilai Maksimal 25.00)</i>	20
33	Kelengkapan	E-Document Putusan Akhir/Penetapan <i>Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan (Nilai Maksimal 28.00)</i>	28
34	Kelengkapan	Data Laporan Mediasi <i>Kesesuaian pencatatan Tanggal Laporan Mediasi (Nilai Maksimal 10.00)</i>	10
35	Kelengkapan	Data Diversi <i>Kelengkapan pencatatan Tanggal Laporan Diversi (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
36	Kelengkapan	Data Nilai Sengketa <i>Kelengkapan pencatatan Nilai Sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana (Nilai Maksimal 8.00)</i>	8
37	Kesesuaian	Agenda Sidang Terakhir <i>Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus (Nilai Maksimal 28.00)</i>	27,94
38	Kesesuaian	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir <i>Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan Tanggal Putusan (Nilai Maksimal 20.00)</i>	30

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
39	Kesesuaian	Publikasi Pihak <i>Kesesuaian Publikasi Perkara sesuai SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 (Nilai Maksimal 29.00)</i>	29,72
40	Kesesuaian	Pengisian BHT <i>Ada Atau Tidaknya Pencatatan BHT pada suatu perkara (Nilai Maksimal 25.00)</i>	24,65
41	Kesesuaian	Penahanan <i>Kesesuaian pencatatan penahanan habis sebelum perkara putus (Nilai Maksimal 25.00)</i>	24,94
42	Kesesuaian	Sisa Biaya Perkara tk pertama <i>Kesesuaian pencatatan pengembalian sisa panjar (Nilai Maksimal 25.00)</i>	23,89
43	Kesesuaian	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB <i>Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB (Nilai Maksimal 25.00)</i>	25

Sumber : <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/>

Adapun guna mendukung proses *sinkronisasi* data SIPP Pengadilan Negeri Sanggau ke SIPP Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sanggau menggunakan akses internet sebanyak 2 (dua) line yang masing-masing berkapasitas 50 mbps, ditambah 1 (satu) line Astinet berkapasitas 26 mbps sehingga diharapkan proses *sinkronisasi* dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk dukungan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sanggau memiliki dukungan teknis dari 1 (satu) orang Kasubbag dan 1 (satu) orang staf yang menangani permasalahan *teknis* dalam penerapan SIPP di Pengadilan Negeri Sanggau.

Selain melakukan *sinkronisasi* ke SIPP Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sanggau juga melakukan *sinkronisasi* ke Pengadilan Tinggi sebagai backup database dan ke SIPP Web yang terpasang di Website Pengadilan Negeri Sanggau dengan alamat <http://sipp.pn-sanggau.go.id/> sehingga memudahkan bagi para pengguna pengadilan untuk dapat melihat perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau. Adapun proses sinkronisasi ke SIPP Web tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari guna menjaga agar data yang disajikan tetap *update*.

Aplikasi ini diharapkan akan dapat membantu memonitoring kualitas data SIPP dan dapat menjadi aplikasi standar monitoring yang diterapkan diseluruh satuan kerja pada lingkup peradilan umum.

Untuk Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2022 dalam hal Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) dalam satu tahun yang biasanya dapat dilihat pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat url <http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/>.

- **Implementasi e-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum**

Aplikasi e-Berpadu merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para APH/masyarakat umum/Penasihat Hukum dalam hal administrasi perkara pidana di

wilayah Kabupaten Sanggau pada Pengadilan Negeri Sanggau. Aplikasi ini merupakan sebagai salah satu pengembangan SPPT-TI untuk mewujudkan sistem Peradilan Pidana secara Elektronik sebagaimana telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang tujuannya untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik. Aplikasi ini sangat penting mengingat seluruh proses perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau telah di *input* pada aplikasi tersebut.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Sanggau terakreditasi “A” (Excellent) selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani yaitu tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 dan akan dilakukan surveilliance satu kali dalam tiap tahunnya.

Sampai dengan akhir tahun 2022 surveilliance yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Sanggau yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Agustus 2022 s/d 9 Agustus 2022 dan dengan temuan minor dan telah ditindaklanjuti.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta untuk melayani para Pengguna Pengadilan maka seluruh layanan Perkara maupun layanan umum lainnya pada Pengadilan Negeri Sanggau dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu.

Pengadilan Negeri Sanggau menyiapkan Meja PTSP yang diantaranya memberikan Pelayanan antara lain : Umum, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana.



Meja Pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Sanggau

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

- Pengadilan Negeri Sanggau menerapkan persidangan pidana secara daring untuk meminimalisir jumlah Pengunjung Sidang di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Sanggau dalam masa pandemi *Covid-19* sejak maret 2020.
- Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan layanan asisten virtual melalui aplikasi WhatsApp.
- Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan e-Court Corner yang dapat digunakan oleh setiap pengguna pengadilan.
- Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan Meja Inzaghe yang dapat digunakan oleh para pihak untuk memeriksa berkas.
- Pengadilan Negeri Sanggau memberikan pendampingan dalam penggunaan aplikasi e-court dan aplikasi eraterang kepada para pengguna pengadilan.
- Informasi Pengadilan Negeri Sanggau dapat diakses melalui website resmi di www.pn-sanggau.go.id
- Memberikan pelayanan yang ramah dan humanis kepada setiap pengguna pengadilan dengan salam, senyum dan sapa.
- Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga masyarakat atau pun pengguna pengadilan dapat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien.
- Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Aplikasi e-Berpadu sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Untuk Pengawas Bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : W17-U6/711/OT.01.2/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 kemudian diperbaharui dengan Nomor : W17-U6/1925/OT.01.2/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan bidang setiap bulannya yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.
- Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Sanggau juga telah diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak pada bulan Agustus 2022 dan terdapat beberapa temuan yang telah ditindaklanjuti.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Sanggau baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut,

sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Selain itu minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan telah diadakan rapat untuk mengevaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya serta melakukan pembinaan terhadap hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita pengganti, sub bagian, baik secara teknis maupun non teknis dengan maksud untuk memacu semangat kerja masing – masing pegawai agar dapat diharapkan semakin hari kinerja akan semakin baik dan secara khusus adalah penekanan terhadap minutes perkara dan permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul.

Pada rapat bulanan tersebut setiap bagian juga membuat laporan hasil kegiatan untuk dilaporkan pada rapat bulanan, yaitu kegiatan dari masing – masing bagian pada bulan sebelumnya. Sehingga dengan adanya laporan tersebut kinerja masing – masing bagian dapat diketahui.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

1. Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Sanggau walaupun dalam realisasinya belum optimal.
2. Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri Sanggau.
3. Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2022 ini masih terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2022 sehingga harus diselesaikan di tahun 2023.
4. Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Sanggau telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.
5. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2022 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun terbatas pada menunggu pemanggilan peserta yang akan mengikuti DIKLAT baik itu dari tingkat banding, Mahkamah Agung RI ataupun dari Balitbang Diklat Kumdil. Namun kami berusaha sedapat mungkin terhadap pemanggilan Peserta Diklat dapat Kami Penuhi dengan baik.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, masih terdapat fasilitas peralatan kantor yang telah lama sehingga setiap tahun diperlukan pengadaan meubelair maupun fasilitas peralatan kantor.
7. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
8. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Sanggau telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standard operating procedure (SOP).
9. Pengadilan Negeri Sanggau sudah terdapat beberapa orang tenaga fungsional kesekretariatan di Pengadilan Negeri Sanggau.

10. Bahwa gedung kantor Pengadilan Negeri Sanggau yang tidak lagi memadai yaitu ruangan hakim sudah tidak layak dan sempit, ruang arsip yang sudah tidak cukup lagi untuk menampung arsip perkara, selain itu gedung juga tidak sesuai prototype, karena itu kami memerlukan anggaran untuk gedung baru agar sesuai prototype dan untuk penambahan ruangan.
11. Bahwa selain kurangnya tenaga (SDM), juga sarana dan prasarana belum mencukupi
Sarana :
Bahwa di Pengadilan Negeri Sanggau kurang luasnya lahan parkir untuk pengunjung maupun pengguna pengadilan.
Prasarana :
Kendaraan dinas roda dua berupa sepeda motor yang, dimana medan yang ditempuh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau sangat berat sehingga memerlukan kendaraan roda dua atau sepeda motor jenis Trail;

B. REKOMENDASI

- Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi mengenai Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035.
- Dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan Bimbingan Teknis, baik bidang Kepaniteraan terutama tentang keuangan perkara perdata (kasir), bimbingan teknis berkelanjutan panitera pengganti dan jurusita maupun bidang Kesekretariatan terutama Manajemen Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Penyusunan LKjIP dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- Mengingat pentingnya dukungan terhadap Teknologi dan Informasi diharapkan Mahkamah Agung RI mengambil langkah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia terutama dibidang Teknis Informasi dan Teknologi guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Sanggau berharap untuk tahun berikutnya mendapat alokasi dana untuk renovasi gedung kantor sehingga sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI.